Integrasi Kebijakan Publik: Sintesis Perspektif Pembangunan, Digitalisasi, dan Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis pemerintah dalam merespons berbagai permasalahan publik sekaligus mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan. Menurut Carl Friedrich, kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu (MAP UMA, 2023). Kualitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh ketepatan perumusannya, tetapi juga oleh efektivitas implementasi, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan pemerintah dalam menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pemerintahan modern, kompleksitas permasalahan publik menuntut pendekatan kebijakan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Oleh karena itu, integrasi kebijakan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk memastikan bahwa berbagai program pembangunan dapat berjalan secara sinergis dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah data sejumlah indikator terkait dampak pembangunan sebagai hasil implementasi dari kebijakan publik terhadap kesejahteraan masyarakat:

Tabel 1. Dampak Pembangunan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

No.	Indikator Kesejahteraan	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia	75,90	76,59
2.	Pertumbuhan Ekonomi Nasional	5,11%	5,47% (TW 3)
3.	Persentase Kemiskinan	8,47% (Maret 2025)	8,07% (Maret 2026)
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,85% **(**Agustus 2025**)**	4,75% (Agustus 2026)

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai publikasi tahun 2025–2026. Diolah penulis (2026).

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya perkembangan positif pada sejumlah indikator pembangunan nasional dari tahun 2025 ke tahun 2026. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 0,69 poin dan 0,36 poin. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan pada capaian pembangunan manusia dan kinerja perekonomian nasional. Di sisi lain, persentase penduduk miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,40 dan 0,10 poin persentase. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Secara keseluruhan, perubahan pada keempat indikator tersebut menunjukkan kecenderungan perbaikan capaian pembangunan nasional, baik dari dimensi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan indikator tersebut memberikan gambaran mengenai capaian pembangunan nasional yang perlu dibaca dalam kaitannya dengan efektivitas kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, perubahan indikator makro tersebut tidak dapat secara langsung diatribusikan pada satu kebijakan tertentu, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Selain indikator makro, terdapat pula berbagai

indikator mikro yang memengaruhi capaian pembangunan nasional, seperti status gizi anak, upah riil, dan akses terhadap pendidikan.

Dinamika lingkungan masyarakat saat ini dipengaruhi oleh arus globalisasi, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, dan meningkatnya mobilitas sosial. Perubahan tersebut memengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap kualitas tata kelola dan kemampuan pemerintah dalam merespons beberapa persoalan publik yang semakin kompleks (Fiqri *et al*., 2026). Permasalahan administrasi publik ini berkembang menjadi persoalan kompleks (*wicked problems*), ditandai dengan ketidakpastian yang semakin tinggi, keterkaitan antarsektor, jumlah aktor yang semakin banyak terlibat, dan membutuhkan lebih dari satu solusi untuk menyelesaikan seluruh aspek masalah (Fiqri *et al*., 2026).

Karakteristik *wicked problems* menunjukkan bahwa permasalahan publik tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Persoalan kemiskinan, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga berhubungan dengan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, infrastruktur, dan kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut koordinasi lintas sektor, integrasi data, serta penyelarasan program pembangunan agar intervensi kebijakan dapat menjangkau akar permasalahan secara lebih komprehensif.

Tantangan pemerintahan modern yang semakin kompleks menyebabkan masyarakat menyadari pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya (Azzahra *et al*., 2026). Capaian manfaat publik sebagai orientasi hasil kerja pemerintah sangat dinantikan, seperti perbaikan ketimpangan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, indikator keberhasilan pemerintah tidak lagi hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata atau memenuhi target administratif saja, tetapi dibutuhkan pula dampak nyatanya (Fadilah & Sari, 2025).

Transformasi tata kelola pemerintahan menjadi jawaban untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap kualitas pelayanan publik (Cahaya *et al*., 2025). Pemerintah dituntut membangun sistem yang transparan, akuntabel, adaptif, dan mampu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sejalan dengan itu, inovasi kebijakan publik diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tidak sekadar menjadi instrumen regulasi, melainkan sebuah keniscayaan yang akan memberikan penguatan dalam merespons dan menyelesaikan problematika di tengah masyarakat (Sururi, 2016). Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang dirancang secara berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam jangka panjang (Kalpika *et al*., 2026). Dalam mendorong perubahan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, maka perlu didukung oleh transformasi digital sebagai salah satu kekuatan utama pendorongnya (Retwando, 2025).

Dalam konteks tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan, digitalisasi, dan kesejahteraan masyarakat, merupakan tiga dimensi yang saling berkaitan. Pembangunan membutuhkan tata kelola yang efektif melalui digitalisasi. Digitalisasi menyediakan peluang untuk meningkatkan efisiensi, keterhubungan, dan kualitas pengambilan keputusan. Sedangkan kesejahteraan masyarakat menjadi orientasi utama dari pembangunan yang didukung oleh digitalisasi.

Digitalisasi pemerintahan mempengaruhi keberhasilan pembangunan, khususnya pada pembenahan dan integrasi data nasional. Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan fundamental dalam tata kelola pembangunan (Bappenas, 2026). Pembangunan dan digitalisasi pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Perspektif ini menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kebutuhan, pengetahuan lokal, serta kapasitas untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah publik.

Integrasi ketiga perspektif memerlukan kerangka kebijakan yang menghubungkan tata kelola pembangunan, inovasi digital, dan hasil kesejahteraan dalam satu siklus. Integrasi kebijakan publik perlu dilaksanakan secara menyeluruh dalam satu siklus tata kelola pemerintahan yang berkesinambungan, mulai dari tahap identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, pengawasan, hingga evaluasi dampak kebijakan.

Pada tahap identifikasi masalah, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai persoalan masyarakat dengan dukungan data dan informasi yang akurat. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun perencanaan kebijakan yang terarah dan terintegrasi antarsektor serta antarlembaga. Dalam tahap implementasi, koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan dan indikator yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi dampak dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan mampu memberikan perubahan nyata terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, integrasi kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai penyelarasan program antarinstansi, tetapi juga sebagai upaya membangun kesinambungan proses tata kelola agar setiap tahapan kebijakan saling terhubung, adaptif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan (Sulistianingsih).

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, D. E., Purnomo, M. A. A., Meirinawati, & Gaol, I. D. L. (2026). Pemerintahan modern di tengah krisis kepercayaan publik dan tantangan transparansi. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *3*(4), 2572–2577. https://jicnusantara.com/index.php/jiic

Badan Pusat Statistik. (2025, 25 Juli). *Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen.* https://www.bps.go.id/assets/pressrelease/2025/07/25/149542/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Agustus). *Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen.* https://www.bps.go.id/assets/pressrelease/2026/08/05/167857/persentase-penduduk-miskin-maret-2026-turun-menjadi-8-07-persen-.html

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 November). *Ekonomi Indonesia triwulan III-2026 tumbuh 5,47 persen (y-on-y).* https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/11/05/169700/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2026-tumbuh-5-47-persen--y-on-y-.html

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 November). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2026 mencapai 76,59, meningkat 0,69 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,90*. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/11/05/171255/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2026-mencapai-76-59--meningkat-0-69-poin-dibandingkan-tahun-sebelumnya-yang-sebesar-75-90-.html

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 November). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,75 persen: Rata-rata upah buruh sebesar 3,42 juta rupiah.* https://www.bps.go.id/assets/pressrelease/2026/11/05/169961/tingkat-

pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-75-persen---rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-42-juta-rupiah.html

Cahaya, C., Alista, D., & Nurhayani, P. (2025). Kepemimpinan transformasional dalam tata kelola pemerintahan dan inovasi sektor publik: Kajian literatur. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, *2*(4), 28–37. https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i4.1297

Fadilah, F. A. N., & Sari, A. A. (2025). Analisis kinerja anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah. *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language, 2*(1), 294–297. https://doi.org/10.47701/label.v2i1.5248

Fiqri, I. N., Khaidir, A., & Adnan, M. F. (2026). Analisis pemecahan persoalan dan dinamika administrasi publik dengan kerangka berpikir sistemik. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, *3*(6), 4301–4309.

Kalpika, A. D., Lorian, R., Syam, F., & Ulfa, K. (2026). Dampak pembangunan infrastruktur berkelanjutan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat: Tinjauan pustaka. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *3*(2), 102–112. https://doi.org/10.62383/terang.v3i2.1706

Kementerian PPN/Bappenas. (2026, 3 Februari). *Digitalisasi dan integrasi data lintas sektor sebagai game changer pembangunan nasional.* https://www.bappenas.go.id/id/berita/digitalisasi-dan-integrasi-data-lintas-sektor-sebagai-game-changer-pembangunan-nasional-4Cy3w

MAP UMA. (2023, 27 November). Manfaat dan pengertian kebijakan publik. https://map.uma.ac.id/2023/11/manfaat-dan-pengertian-kebijakan-publik/

Retwando. (2025). Transformasi digital dalam mendorong pembangunan berkelanjutan: Suatu kajian systematic literature review. *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Widyaiswara, 1* (1), 58–73. https://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/pitnas2024/article/view/339

Sururi, A. (2016). Inovasi kebijakan publik (tinjauan konseptual dan empiris). *Sawala*: *Jurnal Administrasi Negara, 4* (3), 34–43. https://doi.org/10.30656/sawala.v4i3.241